

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Contentious politics, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly. Konsep ini mulai muncul *of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy*” (penggunaan teknik-teknik disruptive dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptive yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat sepertimisalnya demonstrasi, pemogokan, riot, civil disobedience, terorisme, pemberontakan atau revolusi Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial, Contentios Politics dapat di simpulkan suatu proses-proses dari gerakan sosial.¹

Lahan yang Menjadi konflik antara Masyarakat Desa Rantau Karya dengan PT Kaswari Unggul adalah lahan yang saat ini di kelola oleh PT kaswari, namun lahan tersebut di nyatakan oleh Masyarakat sebagai lahan Transmigrasi yang seharusnya di peruntukan untuk wilayah pemukiman warga, hal tersebut menjadi suatu konflik yang mengakibatkan terjadi nya gerakan sosial oleh masyarakat.

Gerakan sosial di Indonesia mulai bermula dari era penjajahan dengan gerakan pro-kemerdekaan yang walaupun awalnya kedaerahan dan sektarian,

¹ Soeseno.N “*Contentious Politics* Di Antara Dua Kota Di Pantai Barat Norwegia Terkait Dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama,” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015).

menjadi cikal bakal gerakan yang lebih luas. Pasca-kemerdekaan, gerakan sosial terus berkembang, termasuk kebangkitan gerakan buruh setelah Reformasi 1998. Waktu Orde Baru menyebabkan gerakan buruh melemah karena sentralisasi, tapi pasca-Reformasi, organisasi buruh baru muncul bergabung dengan petani dan nelayan untuk memperjuangkan hak sosial ekonomi. Gerakan sosial modern juga melahirkan gerakan partisipasi politik langsung, fokus pada peningkatan hak politik dan perlindungan minoritas. Saat ini, diversifikasi gerakan identitas seperti perempuan dan disabilitas semakin kuat, serta peran penting organisasi non-pemerintah dalam promosi hak dan opini publik. Meskipun tantangan fragmentasi dan konflik internal masih ada, gerakan sosial modern di Indonesia tetap relevan dan adaptif dengan dinamika sosial-politis yang berkembang.²

Gerakan masyarakat yang terjadi karena konflik lahan di Desa Rantau Karya ini awal mula terjadi pada tahun 2014 dan berlangsung hingga saat ini, sehingga menimbulkan berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat mengkalim lahan Transmigrasi tersebut merupakan kepemilikan pemukiman masyarakat seluas 1000 hektar lebih yang hingga saat ini di kelola oleh pihak PT seluas 90 Hektar.³

Lahan transmigrasi adalah tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kehidupan para transmigran di wilayah tujuan. Lahan ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu lahan pekarangan dan lahan usaha. Lahan pekarangan

² Muhammad Tristan Shah Jahan, "Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 20, no. 1 (2024),

³ Red, "Konflik Lahan, Warga Rantau Karya VS PT. Kaswari Unggul," *Sniperkasus.Com* 2024.

biasanya digunakan untuk tempat tinggal sementara lahan usaha diperuntukkan bagi kegiatan pertanian atau perkebunan seperti karet atau kelapa sawit.⁴

Lahan transmigrasi diberikan dengan status hak milik, namun ada ketentuan bahwa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan (dijual atau dialihkan) kecuali telah dimiliki selama minimal 15 tahun sejak penempatan. Jika ketentuan ini dilanggar, hak atas tanah dapat dicabut dan tanah kembali menjadi milik negara. Proses pengurusan sertifikat hak milik dilakukan oleh pemerintah dan harus selesai paling lambat lima tahun setelah penempatan transmigran di lokasi tersebut.

Sumber lahan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara, tanah adat yang dilepaskan melalui musyawarah, atau tanah yang telah dibebaskan sesuai peraturan. Lahan ini juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti potensi ekonomi, aksesibilitas ke wilayah berkembang, serta tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan pengelolaan yang baik, lahan transmigrasi diharapkan dapat menjadi basis penghidupan yang berkelanjutan bagi para transmigran dan mendukung pembangunan wilayah baru.

Transmigrasi adalah bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal yang dilakukan atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi adalah program khas Indonesia, yang telah dilakukan dan diimplementasikan sejak lama, Transmigrasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transmigrasi serta masyarakat yang ada di sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan

⁴ Sumarno and Indrianawati, "Desain Geodatabase Lahan Transmigrasi," *No. 4/ XIV*, no. 4 (2010): 189–201.

dan kesatuan bangsa. Sejarah Program Transmigrasi dapat ditarik sejauh masa kolonial Belanda, di mana pada era ini dikenal dengan istilah kolonisasi, yang mana dilakukan program perpindahan masyarakat dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan program politik etis yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di pulau Jawa; kepemilikan tanah di pulau Jawa yang semakin sempit karena adanya penambahan penduduk yang cepat; serta adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa. Program transmigrasi yang pertama dilakukan di Indonesia adalah transmigrasi yang dilakukan kepada 155 keluarga yang berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan, Lampung, pada tahun 1905. Periode penyelenggaraan kolonisasi ini dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu yang pertama, periode kolonisasi dengan bantuan pemerintah tahun 1905- 1911, periode kolonisasi dengan bantuan Bank Rakyat Lampung (The Lampongsche Bank) tahun 1911-1928, serta periode Bawon, tahun 1923-1942.⁵

Pada tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanjung Jabung Timur telah menyurati PT. Kaswari Unggul untuk mencabut tanaman kelapa sawit yang telah mereka tanam di lahan tersebut, namun perusahaan belum mematuhi

⁵ Stella Vania, "Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah Di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang Ii Sp 3 Provinsi Aceh," *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 113.

permintaan tersebut. “Sampai hari ini itu tidak dilakukan, yang Dimana mereka mengkalim lahan tersebut milik Perusahaan.”⁶

Gerakan Masyarakat Desa Rantau Karya ini dipicu oleh keinginan untuk melindungi hak-hak mereka atas lahan transmigrasi yang di kelola oleh pt kaswari, dan pada tanggal 6-7 Mei 2024, masyarakat Desa Rantau Karya yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Rantau Karya melakukan sebuah gerakan nyata untuk merebut hak klaim kepemilikan lahan transmigrasi yang diduga digarap oleh PT Kaswari Unggul. Mereka melakukan penanaman pinang dan menduduki kembali lahan transmigrasi tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi pemukiman transmigrasi sesuai dengan keputusan menteri nomor 139/Kpts-II/1991.⁷

Gerakan ini dipelopori oleh Ketua Basis SPI Rantau Karya, Haryono, yang menyebutkan bahwa lahan transmigrasi seluas 1.461 ha di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, telah dipengaruhi oleh PT. Kaswari Unggul. Perusahaan ini diduga menggarap sekitar 90 ha lahan yang sebenarnya harus digunakan untuk pemukiman transmigrasi. Dengan melakukan penanaman pinang dan pendudukan lahan, masyarakat dapat menunjukkan ketegasannya dalam mempertahankan hak-hak mereka atas lahan tersebut.⁸

⁶ jambi link, “Warga VS PT Kaswari Unggul, Konflik Lahan Transmigrasi Di Tanjung Jabung Timur,” *Berita Satu*, 2024.

⁷ Syahrial, “PT Kaswari Unggul Diduga Serobot Lahan Transmigrasi, Ini Yang Dilakukan SPI Rantau Karya,” (Potal Tebo, 2024)

⁸ zuandanu, “Lawan Pencaplokan ,Masyarakat Tanjabtim Duduki Kemali Lahan,” Oerban.Com, 2024.

Selain itu, masyarakat juga melakukan mediasi bersama pihak kepolisian dari Polres Tanjabtim untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Pertemuan mediasi direncanakan pada tanggal 13 Mei 2024 di kantor desa Rantau Karya. Pada pertemuan ini, garansi non-gangguan telah diberikan kepada masyarakat agar tanaman mereka tidak diganggu oleh pihak PT. Kaswari Unggul. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjaga dan proses penyelesaian konflik berlangsung lancar. Melalui kombinasi antara tindakan nyata seperti penanaman pinang dan pendudukan lahan serta mediasi yang efektif, harapan besar bahwa konflik ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.⁹

Pergerakan masyarakat Desa rantau Karya untuk mengklaim kepemilikan lahan yang diserobot oleh PT Kaswari dipicu oleh beberapa kepentingan mendasar. Pertama, hak atas lahan Transmigrasi menjadi sangat penting bagi identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat. Banyak Masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk pertanian dan sumber daya alam lainnya, sehingga kehilangan akses dapat mengancam kehidupan mereka, Kedua, ketidakadilan dalam proses penguasaan lahan menciptakan ketidakpuasan. Masyarakat merasa diabaikan karena perusahaan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan atau negosiasi, yang menyebabkan konflik dan protes, Ketiga, dukungan hukum untuk pengakuan hak atas lahan semakin meningkat, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih aktif.¹⁰

⁹ Syahrial, Loc. Cit.

¹⁰ Ahmad Dhiaulhaq, "Temukan Dua Cara Jitu Yang Di Pakai Masyarakat Lokal Dalam Memperjuangkan Lahan," (*The Conversation*, 2020).

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang gerakan sosial masyarakat dalam mengklaim kepemilikan lahan transmigrasi. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi konflik lahan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas tanah, dan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan empat literatur review yang semua merupakan jurnal nasional, yang pertama yaitu Gerakan Petani Desa Gaji Kecamatan Kerek Tuban dalam memperjuangkan lahannya yang diklaim PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,¹¹ penelitian ini ditulis oleh Agus Amirul muslimin pada tahun 2015, dan membahas gerakan petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban, yang memperjuangkan hak atas lahan mereka yang diklaim oleh PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. Gerakan petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban, merupakan respons terhadap klaim lahan oleh PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. yang dimulai sejak penjualan lahan secara ilegal oleh Kepala Desa pada tahun 1998. Konflik ini terungkap pada tahun 2003, memicu perlawanan warga yang dipimpin oleh tokoh pemuda, Abu Nasir. Aksi kolektif yang dilakukan oleh petani, termasuk demonstrasi besar-besaran pada tahun 2012, bertujuan untuk menuntut hak atas lahan dan pengelolaan limbah. Dukungan dari Pergerakan Pemuda Ronggolawe (PPR) dan politisi lokal, seperti H.M. Miyadi, memperkuat gerakan

¹¹ Agus Amirul Muslimin, "Gerakan Petani Desa Gaji Kecamatan Kerek Tuban Dalam Memperjuangkan Lahannya Yang Diklaim Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk," 2015, 1–49.

ini, meskipun petani menghadapi tantangan internal dan kekecewaan terhadap janji politik yang tidak terealisasi. Meskipun ada perubahan sikap di antara beberapa petani yang mulai mempertimbangkan untuk menjual kembali tanah mereka, gerakan ini tetap menunjukkan dinamika perjuangan dalam mempertahankan hak atas lahan dan menuntut keadilan sosial.

Penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang strategi masyarakat dalam mempertahankan lahan pertanian dari ancaman ekspansi pertambangan batu bara ditulis oleh Muhammad Ikhsan Alim, Sukapti Wartoharjo, dan Ratna Purba dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2010¹². Penelitian ini menyoroti peran tokoh masyarakat, seperti Bapak Kris dan Bapak Legimin, dalam mengorganisir perlawanan terhadap perusahaan tambang dan menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berhasil mempertahankan lahan pertanian mereka dari ancaman ekspansi pertambangan batu bara melalui dua strategi utama: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Masyarakat, yang dipimpin oleh tokoh lokal seperti Bapak Kris dan Bapak Legimin, memilih untuk tidak menjual lahan mereka dan tetap melanjutkan praktik pertanian, sambil juga mengorganisir demonstrasi untuk menolak izin tambang. Dukungan dari pemerintah dan partisipasi kolektif masyarakat berperan penting dalam upaya ini, yang juga mencakup pengembangan agrowisata sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini

¹² Ratna Purba Muhammad Ikhsan Alim. , Sukapti Wartoharjo, “Strategi Masyarakat Dalam Mempertahanan Lahan” 9, no. 3 (2021): 12–21.

memberikan wawasan tentang dinamika konflik sosial dan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan, serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Yang ketiga, Penelitian mengenai gerakan sosial petani di Kalibakar, yang ditulis oleh Wahyudi pada tahun 2023, mengkaji dinamika perjuangan petani untuk hak atas tanah dari tahun 1992 hingga 2005, dengan fokus pada pengaruh dukungan jaringan dan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi perilaku kolektif¹³. Melalui analisis menggunakan teori perilaku kolektif Neil J. Smelser dan model mobilisasi tindakan kolektif Charles Tilly, penelitian ini mengidentifikasi empat periode perkembangan gerakan, mulai dari era jaringan terbatas hingga era deklinasi, dengan puncak dukungan terjadi antara 1998-2000 saat petani berhasil merebut kembali 94% lahan perkebunan. Tiga tipe aktor dalam gerakan idealis, materialis, dan oportunist berperan dalam dinamika perjuangan, sementara aktivasi dan kontrol sosial serta dukungan jaringan terbukti menjadi determinan krusial dalam keberhasilan gerakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lapangan lebih lanjut untuk memahami dinamika gerakan sosial dan penanganan masalah tanah yang lebih adil.

Selanjutnya yang ke empat yaitu penelitian yang berjudul dari tinjauan literatur yang telah dilakukan terkait penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, dengan itu penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa

¹³ Wahyudi, "Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani [Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan]," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 1 (2010): 19–42.

gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lahan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam strategi perlawanan. Penelitian Agus Amirul Muslimin mengungkapkan pentingnya aksi kolektif petani di Desa Gaji dalam melawan klaim lahan oleh PT Semen Indonesia, sedangkan studi Muhammad Ikhsan Alim et al, menyoroti keberhasilan masyarakat Desa Sumber Sari dalam mempertahankan lahan pertanian dari ancaman tambang batu bara melalui kolaborasi dan dukungan pemerintah. Wahyudi menekankan bahwa dukungan jaringan dan faktor struktural sangat mempengaruhi keberhasilan gerakan petani di Kalibakar, sementara penelitian Fadly dan Agustang menunjukkan efektivitas masyarakat Bara-Barayya dalam melawan perampasan lahan melalui aksi kolektif yang terorganisir, Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa solidaritas komunitas dan strategi yang terencana merupakan kunci dalam mencapai keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan hak atas tanah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan literatur review yang ada yaitu penelitian sama-sama menganalisis gerakan sosial sebagai respons terhadap konflik lahan, dengan fokus pada penggunaan berbagai strategi perlawanan untuk memperjuangkan hak atas tanah. Selain memiliki persamaan adapun perbedaan di antara penelitian ini terhadap literatur review yang di mana Penelitian ini dalam konteks spesifik pada konflik lahan (lahan transmigrasi) sedangkan penelitian lainnya memiliki konflik pada industri semen, pertambangan, perkebunan dan penekanan teoretis serta fokus analisis yang mungkin berbeda dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi gerakan sosial tersebut.

Penelitian mengenai klaim kepemilikan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penting untuk diteliti karena fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat lokal, serta dampaknya terhadap konflik agraria, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal berinteraksi dengan pihak swasta dan pemerintah dalam mengatasi konflik sumber daya alam, serta bagaimana *contentious politics* dapat dipelajari dan diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran. Oleh karena itu studi di fokuskan kepada ***Contentious Politics Masyarakat Dalam Mengklaim Kepemilikan Lahan.***

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Contentious Politics* dalam gerakan pengklaiman lahan oleh masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis bentuk-bentuk *Contentious Politics* yang dilakukan oleh masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya dalam gerakan pengklaiman lahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian gerakan sosial masyarakat dalam konflik agraria, khususnya dalam konteks masyarakat transmigran.

Hasil nya dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika gerakan sosial dalam memperjuangkan hak atas tanah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan strategi bagi masyarakat transmigran dalam memperjuangkan hak lahan melalui gerakan sosial yang terorganisir dan legal. Selain itu, penelitian ini juga memberi masukan bagi pemerintah dan perusahaan dalam menangani konflik agraria secara lebih adil.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang di jadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat penelitian, Landasan teori juga sebagai alur logika atau sekumpulan konsep dan pembahasan-pembahasan materi yang telah tersusun secara sistematis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa landasan teori merupakan suatu kumpulan definisi, dan berbagai materi yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan materi.¹⁴

¹⁴ Ralph Adolph, "Pengertian Landasan Teori," *Eprints.Ums.Ac*, 2016, 1–23.

Teori menjadi payung peneliti dalam menganalisis masalah yang di temukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang peneliti gunakan:

1.5.1 Pendekatan Sosiologi Politik

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan- keputusan yang diambil oleh penguasa.¹⁵

Sosiologi politik menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami fenomena politik dalam konteks sosial. Pendekatan historis menelusuri perkembangan suatu masalah politik dari masa lalu, sementara pendekatan komparatif membandingkan fenomena serupa di berbagai masyarakat. Pendekatan institusional fokus pada peran lembaga politik dalam membentuk perilaku politik, sedangkan pendekatan behavioral menganalisis perilaku individu dalam konteks politik. Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan keterbatasan, namun penggabungan beberapa pendekatan umumnya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan memahami berbagai perspektif ini, kita dapat menganalisis isu-isu politik secara lebih mendalam dan mengembangkan solusi yang lebih efektif.¹⁶

¹⁵ Susi Fitria Dewi , *Sosiologi Politik* (gre publishing, 2017).

¹⁶ Dewi and Ph.

Pandangan sosiologi politik terhadap gerakan sosial menekankan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Menurut Giddens, gerakan sosial adalah usaha bersama untuk mencapai kepentingan kolektif. Tarrow menambahkan bahwa gerakan sosial berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap elit dan pemegang kekuasaan, sering kali muncul dalam konteks ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.¹⁷

1.5.2 Teori *Contentious Politics*

Teori *contentious politics* diajukan oleh Charles Tilly. Teori ini untuk menjembatani kelemahan masing-masing teori dan konsep tentang gerakan sosial yang telah ada sebelumnya. Dengan *contentious politics* Tilly, maksudkan adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dari pada reguler. Mereka juga mensyaratkan peristiwa melibatkan interaksi kolektif diantara pembuat klaim dan objek klaim ketika paling tidak satu pemerintah menjadi pengklaim atau objek klaim atau sebuah kelompok mengklaim dan bila terjadi akan mempengaruhi paling tidak salah satu objek yang di klaim¹⁸

Contentious politics muncul karena pertentangan yang terjadi pada warga lokal, sehingga terbentuklah gerakan sosial¹⁹ *Contentious politics*, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan

¹⁷ Atina Nuzulia, "Pengantar Sosiologi Politik Bagi Mahasiswa Ekonomi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

¹⁸ M. Adha Al Kodri, "Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics," *Society* 4, no. 2 (2016): 74–83

¹⁹ Maulida Rita Widyana, "Gerakan Sosial Alarmgede sebagai Contentious Politics dalam penolakan penambahan PLTP yang merampas ruang hidup Masyarakat (Studi Kasus: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2)," *Repositori Ugm*, 2023.

sosial. Konsepsi ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam. Konsep ini mulai muncul kembali pada tahun 1990-an *Contentious politics*, menurut Charles Tilly, adalah “the use of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy” (penggunaan teknik-teknik disruptive dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptive yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, riot, civil disobedience, terorisme, pemberontakan atau revolusi. Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial. *Contentious politics* bukanlah gerakan sosial tetapi sejumlah literatur tentang politik perseteruan menuliskan bahwa perpolitikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah tahapan awal kemunculan sebuah gerakan²⁰

Teori *contentious politics* yang dikemukakan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly dapat membantu memahami konflik klaim kepemilikan lahan transmigrasi yang diduga diserobot oleh PT Kaswari di Desa Rantau Karya. Teori ini menekankan bahwa konflik politik sering kali melibatkan interaksi antara kelompok yang membuat klaim, dalam hal ini masyarakat desa, dengan pihak yang menjadi objek klaim, seperti perusahaan atau pemerintah. Dalam kasus ini, masyarakat mengklaim hak atas lahan yang mereka anggap telah diserobot oleh perusahaan. *Contentious politics* juga melibatkan penggunaan teknik disruptif

²⁰Justin Caron and James R Markusen, “Politik dan Otonomi Daerah (Studi Kasus Peran Elit Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur),” *Repositori Universitas Siliwangi*, no. 78 (2016): 1–23.

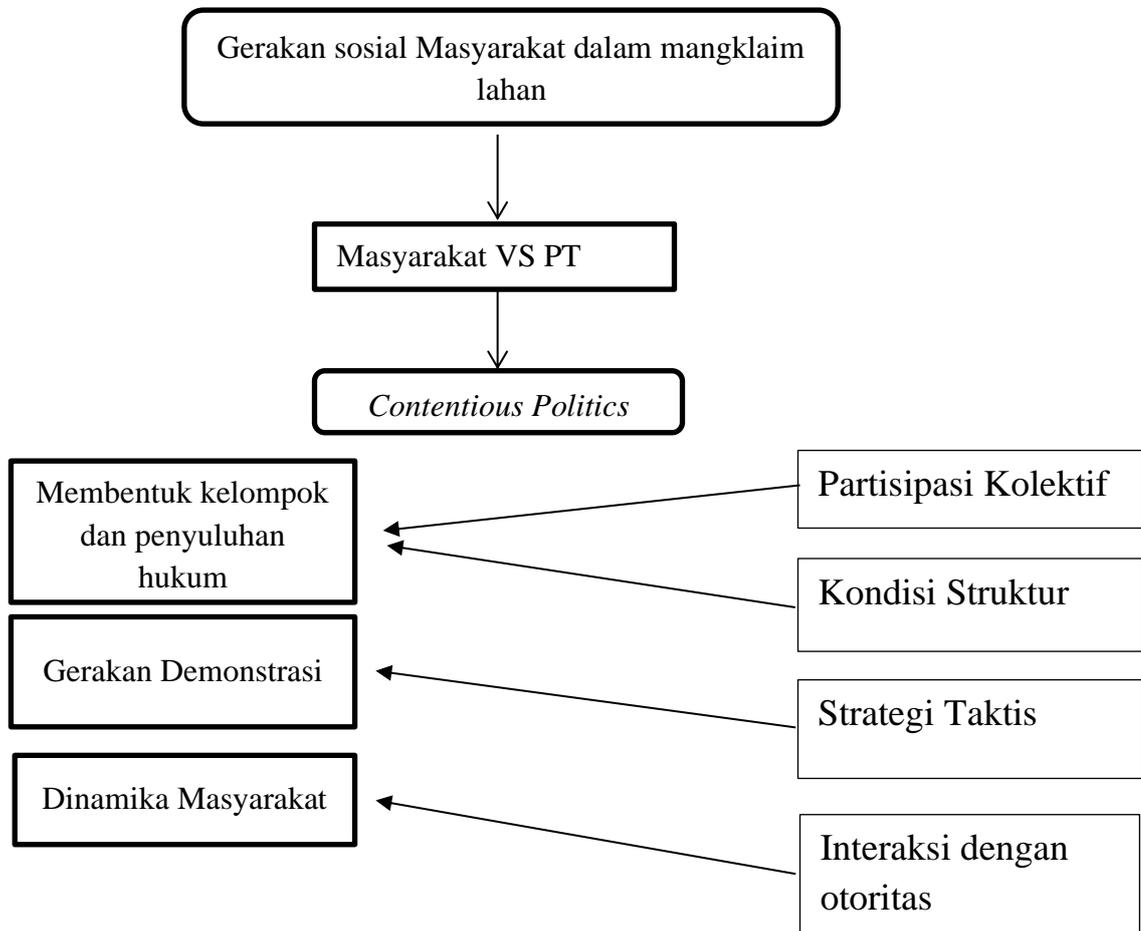
seperti protes dan demonstrasi, yang bisa terjadi ketika masyarakat merasa hak mereka diabaikan. Selain itu, teori ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam konflik semacam ini, karena pemerintah sering kali terlibat sebagai pengambil kebijakan atau sebagai pihak yang harus menyelesaikan konflik. Konflik semacam ini sering kali menjadi tahap awal terbentuknya gerakan sosial, di mana masyarakat yang merasa dirugikan bersatu untuk memperjuangkan hak mereka.²¹

Penggunaan teori *Contentious* untuk menganalisis proses aksi yang menciptakan suatu gerakan sosial, termasuk pemerintah dan perusahaan. Teori ini membantu memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan yang saling bertentangan dalam konteks penguasaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat berjuang mempertahankan hak atas lahan mereka dalam menghadapi tekanan eksternal, serta untuk mengidentifikasi strategi mobilisasi sosial yang efektif dalam konteks tersebut.²²

²¹ Khalis Asyifani, *Contentious Politics: Strategi Internal dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial dalam Koalisi*, *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 3 (Juli 2024): 428-447.

²²*Ibid*

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²³

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah²⁴

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.²⁵

Tujuan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi yang ada tanpa manipulasi variabel, fokus pada kualitas data, dan memahami perspektif masyarakat terkait masalah tersebut.

²³ Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," 21, no. 1 (2021): 33–5.

²⁵ *ibid*

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap hubungan, sikap, dan konflik yang terjadi dalam konteks sosial yang kompleks.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan fokus pada konflik agraria yang melibatkan klaim kepemilikan lahan. Dengan menggunakan teori *Contentious Politics*, penelitian ini telah menganalisis dinamika proses upaya masyarakat dalam mengklaim kepemilikan lahan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis dinamika politik perseteruan yang terjadi antara masyarakat dan pihak-pihak lain terkait klaim kepemilikan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses dalam Langkah-Langkah aksi yang mengarah pada gerakan sosial dan bagaimana Masyarakat menghadapi pihak yang dianggap mengancam hak mereka atas lahan.

1.7.4 Sumber data

Penelitian mengenai klaim kepemilikan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian

dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer²⁶:

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya²⁷

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, maka diperlukan informan yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Menurut Maeleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁸

1. Aparatur Desa Rantau karya
: Nur Ngabidah
2. koordinator Basis Serikat Petani Desa Rantau Karya
: Yoggy E Sikumbang
3. Masyarakat Desa Rantau Karya
: Fuji Setyo Wati

²⁶ Sugiyono, "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Manajemen*, 2019, 13–20,

²⁷Ibid.

²⁸Hermawati "Persepsi masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka area pertambangan emas di desa Sumi kecamatan Lambu Kabupaten Bima" *jurnal akuntansi* 11 no.2(2017):141-49

4. Pihak PT kaswari Unggul (pegawai/Pekerja)

: Fandi Setiawan

: Kimin

1.7.5 Keabsahan Data

Moleong mengungkapkan bahwa keabsahan data sangatlah penting bagi peneliti kualitatif, karena yang pertama dengan keabsahan data peneliti kualitatif dapat melakukan penyangahan balik kepada pihak yang menuduhkan bahwa. Pada data penelitian kualitatif terdapat kecurangan data. Selanjutnya adalah uji keabsahan data merupakan suatu bagian yang tidak, bisa dipisahkan pada tahap penelitian kualitatif.²⁹ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan secara:

1. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau uji kepercayaan, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.³⁰

²⁹ Noor,J.“Metodologi Penelitian. Jakarta: *Kencana*,” 2011, 23.

³⁰ khanza jasmine, “Analisis Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Dalam Jaringan,Studi Kasus ;SMA Negri Tulakn,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1–8.